



Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Batukarut di Tengah Pandemi Melalui Program Pendampingan Pemberian Bantuan Sosial

Miftah Herdin Alfanza¹, Solihin²

¹Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung, e-mail: miftahalfnz@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, e-mail: Solihin@gmail.com

Abstrak

Penyebaran wabah Covid-19 mengakibatkan efek domino bagi semua sektor yang berawal dari persoalan kesehatan ke persoalan sosial, ekonomi, hingga politik. Menghadapi situasi tersebut pemerintah telah merancang berbagai kebijakan untuk menanggulangi permasalahan yang ada. Tidak terkecuali permasalahan ekonomi. Dalam permasalahan ekonomi ini cukup luas cakupannya karena disini berbicara mengenai masyarakat. Dalam permasalahan ekonomi seperti ini banyak masyarakat terutama masyarakat kecil yang terdampak cukup keras dalam sektor ekonominya. Terdapat beberapa warga yang dirumahkan, bahkan PHK. Maka perlu dilakukan kegiatan yang berupaya untuk meringankan beban mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Oleh karena itu kami bekerja sama dengan pihak pemerintah desa setempat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembagian bantuan sosial kepada masyarakat desa Batukarut. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode PAR (*Participatory Action Research*). Pendekatan Participatory Action Research (PAR) merupakan pendekatan yang prosesnya bertujuan untuk pembelajaran dalam mengatasi masalah dan pemenuhan kebutuhan praktis masyarakat. Tujuannya tentu saja untuk meringankan beban yang mereka pikul selama pandemi ini. Hasil dari kegiatan ini adalah tanggapan positif dari masyarakat karena mereka sangat terbantu dengan adanya kegiatan ini dan sangat berharap agar kegiatan ini dilakukan secara berkelanjutan dan lebih merata.

Kata Kunci: Bansos, Covid-19, Masyarakat

Abstract

The spread of Covid-19 has caused a domino effect for all sectors, starting from health, economic and political issues. Facing this situation, the government has designed various policies to overcome the existing

problems. No economic problem. In this economic problem, the scope is quite broad because here we are talking about the community. In economic problems like this, many people, especially small people, work quite hard in their economic sector. There are some residents who have been laid off, even laid off. So it is necessary to carry out activities that seek to ease their burden in meeting their basic needs. Therefore, we work closely with the local village government to participate in the implementation of the distribution of social assistance to the Batukarut village community. The implementation of this activity is carried out using the PAR (Participatory Action Research) method. The Participatory Action Research (PAR) approach is an approach whose process aims to learn how to solve problems and fulfill the practical needs of the community, the goal is of course to ease the burden they carry during this pandemic. The result of this activity is a positive response from the community because they are greatly helped by this activity and hope that this activity is carried out in a sustainable and more equitable manner

Keywords: covid-19, social assistance, community

A. PENDAHULUAN

Covid – 19 ini adalah penyakit yang pertama kali diidentifikasi di Wuhan, China yang disebabkan oleh *Novel Coronavirus (2019-nCov)* atau yang kerap disebut dengan *SARS-CoV-2*, dan merupakan virus yang baru dan belum pernah diidentifikasi oleh manusia (Armiani, 2020). Virus ini menyerang sistem pernafasan manusia seperti paru – paru, tenggorokan dan hidung. Beberapa gejala umum dari Covid-19 ini adalah batuk, pilek, dan sesak nafas. Namun untuk beberapa gejala berat, gejala yang timbul dapat berupa pneumonia, gagal ginjal, nyeri pada bagian tubuh, dan nyeri lambung. Menurut Annisa Salsabila (2020) Virus corona inipun bersifat yaitu virus ini dapat ditularkan antara hewan dan manusia. Tidak menutup kemungkinan bahwa manusia dapat tertular virus ini melalui hewan, dikarenakan para ilmuwan telah mengemukakan hasil penelitiannya bahwa virus ini dapat menginfeksi tikus, kucing, burung, anjing dan hewan lainnya. Persebaran SARS-Cov-2 dari manusia ke manusia menjadi sumber transmisi utama sehingga penyebarannya menjadi lebih agresif, dari pasien simptomatik terjadi melalui droplet yang keluar saat batuk atau bersin (Susilo, 2020). Ditambah lagi dengan masa manifestasi klinisnya muncul dalam 2 – 14 hari setelah terjadinya penularan. (Kemenkes, 2020) Dalam selang waktu tersebut, kondisi orang yang diduga terinfeksi COVID-19 diisolasi dan dipantau di rumah sakit, rumah atau tempat lain (Kemenkes, 2020). Hingga 31 Agustus 2021, tercatat sudah ada 4.089.801 orang positif covid – 19, 3.790.497 orang yang sembuh, dan 133.023 orang yang meninggal dunia karena covid – 19. Angka yang cukup fantastis ini menunjukkan bahwa penularan covid – 19 ini cukup cepat. Terlebih lagi terdapat mutasi yang ada pada virus covid – 19 ini menambah kebrutalan penularan antar individunya. Berangkat dari hal tersebut, maka pemerintah menerapkan peraturan tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang diberlakukan di berbagai

daerah di Indonesia. Menurut data, pada bulan Agustus Jawa Barat belum keluar dari 5 daerah dengan kasus tertinggi secara Nasional. Pemerintah Indonesia mencatat 5 provinsi dengan kejadian Covid-19 tertinggi adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur (Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, 2020). Ini menunjukkan bahwa penularan covid – 19 ini masih cukup ganas di Jawa Barat. Hal ini juga ditunjukkan oleh data *Bed Occupancy Rate (BOR)* yang pada bulan Juni kemarin mencatatkan angka keterisian hingga 98 persen. Tentu saja angka ini sudah ada dalam titik krusial menuju penuhnya rumah sakit yang menangani Covid – 19. Ini belum ditambah dengan warga yang bergejala dan enggan untuk melakukan tes karena berbagai hal seperti ketakutan, dan khawatir kegiatan sehari – harinya terganggu. Penanganan bukan hanya kepada pasien yang terkonfirmasi positif, tapi juga kepada orang disekitarnya, karena akan lebih baik mencegah daripada mengobati. Isi informasi tentang hal ini dapat dalam bentuk kalimat maupun gambar atau kombinasi (Halajur, 2020). Pemerintah juga menggalakan kampanye penerapan 6M (Mencuci tangan, Memakai masker, Menjaga jarak, Membatasi mobilitas, Menghindari kerumunan dan Menjaga pola makan dan istirahat). Selain upaya preventif ini, pemerintah juga menggalakan vaksinasi bagi masyarakat. Sebagaimana kita ketahui, vaksinasi ini sangatlah penting bagi kita ditengah pandemi seperti ini. Vaksinasi pertama ini dilakukan terhadap tenaga kesehatan pada Januari 2021. Selanjutnya, mulai bulan April 2021 sudah dilakukan vaksinasi secara massal dengan lansia sebagai sasaran pertamanya. Selanjutnya bertahap kepada orang dewasa, lalu anak – anak. Vaksinasi bukan hanya melindungi kita yang mendapat dosis vaksin. Tapi juga melindungi mereka yang tidak bisa divaksinasi dikarenakan berbagai hal.

Dibalik semua upaya pemerintah untuk mengatasi dampak yang terdampak langsung oleh pandemi covid-19 ini, terdapat juga dampak yang perlu perhatian dan kepedulian dari pemerintah atas adanya pandemi ini. Salah satunya adalah sektor ekonomi. Beberapa kebijakan untuk mengantisipasi penyebaran dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang tentunya berdampak buruk terhadap perekonomian negara. Di antaranya aktivitas pada sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), sektor pariwisata, dan sektor manufaktur yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi melambat. Tidak hanya perusahaan dengan modal besar saja yang terdampak, namun perusahaan dengan modal terbatas juga sangat terdampak dengan Covid ini (Marlinah, 2021). Perusahaan mengurangi karyawannya karena pemasukan yang tidak mencukupi. UMKM mati karena masyarakat cenderung untuk menyimpan uangnya dan hanya membeli barang sesuai kebutuhan, dan lain-lain. Akhirnya tenaga kerja berkurang yang otomatis pengangguran melonjak tinggi dan berkaitan sangat erat dengan kemiskinan yang meningkat. Dalam dunia usaha, terdapat 3.3 milyar orang yang terancam terganggu pendapatannya atau bahkan kehilangan pekerjaan dalam berbagai tingkatan. Tentu saja ini adalah pukulan yang keras bagi para pengusaha baik mikro sampai skala besar. Bayangkan saja berapa

banyak orang yang bergantung hidupnya terhadap satu sektor pekerjaan. Proyeksi yang diperoleh dari ekonom Core Indonesia yang dilangsir pada tanggal 31 Juli 2021, bahwa kemiskinan Indonesia akan kembali meningkat karena dipengaruhi banyak hal, salah satunya adalah penerapan PPKM oleh pemerintah. Berdasarkan perkiraannya, proyeksi tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada bulan Agustus 2021 ini di rentang 7,15 persen - 7,35 persen. Dan angka ini akan didominasi oleh masyarakat yang menggantung hidupnya pada sektor non formal. Oleh karena itu, Pemerintah dituntut untuk sesegera mungkin melakukan aksi nyata dalam menangani ancaman Covid-19 melalui pembentukan produk hukum turunan. Langkah-langkah Kebijakan apapun yang diambil oleh Pemerintah akan sangat berdampak pada proses percepatan penanganan Covid-19 di Indonesia. Namun demikian, pemerintah sebenarnya sudah melakukan antisipasi guna mencegah krisis ekonomi selama Covid-19. Beberapa kebijakan berupa stimulus ekonomi diluncurkan untuk meringankan beban dunia usaha di tengah pandemi. Berbagai kebijakan dikeluarkan pemerintah, mulai dari kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Seperti pemberlakuan insentif pajak, dan berbagai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dikutip dari laman Kompas.com, Anggaran PEN 2021 ini pun dianggarkan sebesar Rp. 699,43 triliun yang meningkat 20 persen dari anggaran PEN 2020. Anggaran ini difokuskan pada lima sektor, yaitu kesehatan (176,3 triliun), perlindungan sosial (157,4 triliun), dukungan UMKM (186,8 triliun) insentif usaha dan pajak (53,9 triliun), dan program prioritas (125,1 triliun). Berdasarkan data diatas, terdapat angka yang cukup fantastis dalam sektor perlindungan sosial yang menyentuh 157,4 triliun. Hingga Agustus 2021 ini sudah terserap Rp. 91,84 triliun yang berarti sekitar 49,2 persen anggaran yang sudah terserap. Bantuan perlindungan sosial ini meliputi (1) Program Keluarga Harapan (PKH), (2) Bantuan Sosial Tunai, (3) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa), (4) Bantuan Sosial Sembako (BSS) untuk Wilayah Jakarta Bogor Depok Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek), (5) Kartu prakerja, (6) Kartu sembako, dan (7) Subsidi listrik.

Desa Batukarut sendiri tentunya juga menjadi masyarakat yang ikut terdampak ekonominya oleh pandemi ini. Terlebih dalam masa PPKM seperti ini, masyarakat desa Batukarut ini juga masih berjuang untuk pulih dari keadaan yang cukup sulit ini. Kesulitan dalam ekonomi ini dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Batukarut, terlebih lagi seperti data yang terdapat dalam website resmi desa, bahwa mayoritas masyarakat desa Batukarut ini bekerja sebagai karyawan swasta, buruh harian lepas dan berdagang. Selama masa pandemi covid – 19 terdapat masyarakat desa Batukarut dirumahkan, bahkan di PHK, dan bagi yang membuka usaha, usahanya sepi sehingga berpengaruh kepada pemenuhan kebutuhan sehari – hari. Berangkat dari permasalahan yang ada, maka kami disini akan berpartisipasi dan berkontribusi dalam pendistribusian bantuan sosial kepada masyarakat dalam rangka percepatan Program pemulihan ekonomi 2021. Bantuan sosial (bansos) ialah pemberian santunan berbentuk donasi atau barang baik dari pemerintah maupun suatu lembaga kepada perorangan, keluarga, komunitas, dan rakyat umum yang sifatnya tidak selamanya

serta selektif (Sitanggang, (2014)). Lebih lanjut memaparkan bahwasannya kebijakan bantuan sosial menjadi salah satu bentuk nyata tanggung jawab pemerintah baik pusat maupun daerah terhadap kondisi rakyatnya yang prasejahtera dan terabaikan di tingkat terendah. Pembagian bantuan sosial yang diberikan pemerintah untuk masyarakat Indonesia bukanlah suatu hal baru. Beragam skema bantuan sosial serta subsidi telah dilaksanakan pemerintah untuk mencukupi hak dasar, meringankan tanggungan, dan memperbaiki tingkat hidup warga negara yang kurang berkecukupan. Hal ini sejalan dengan (Alfitri, (2012)) teori welfare state, merujuk dari konsep welfare state dalam Encyclopedia Britannica yakni terkait tanggung jawab negara sebagai garda terdepan dalam melindungi serta memakmurkan kesejahteraan ekonomi dan sosial rakyatnya. Tujuan diadakannya pembagian bantuan sosial ini adalah Bantuan sosial yang disalurkan agar masyarakat prasejahtera tersebut mampu mencukupi kehidupannya secara seimbang (Sosial., (2017)). Dengan harapan, adanya program yang diselenggarakan ini menjadi angin segar bagi warga yang mendapat bantuan ditengah kondisi yang serba sulit seperti saat ini.

B. METODE PENGABDIAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan secara luar ruangan selama kurang lebih 1 bulan. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode PAR (*Participatory Action Research*). Pendekatan Participatory Action Research (PAR) merupakan pendekatan yang prosesnya bertujuan untuk pembelajaran dalam mengatasi masalah dan pemenuhan kebutuhan praktis masyarakat. (Moeliono, 1996). Tekanan aspek penelitian bukan pada validitas data yang diperoleh, namun pada nilai praktis untuk pengembangan program itu sendiri. (Gitosaputro, 2006). Adapun tahap dan metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah yang pertama, persiapan dilakukan dengan melakukan survei lokasi dan tempat pengabdian akan dilakukan. Dilakukan kunjungan ke lokasi, dan mempertimbangkan dengan jarak yang kami tempuh dari rumah masing masing menuju tempat pengabdian. dan wawancara kepada beberapa tokoh masyarakat setempat dan aparat desa yang bersangkutan. Selain wawancara, dilakukan juga observasi untuk menemukan permasalahan secara konkret. Selanjutnya, berkoordinasi dengan aparat setempat dan pihak – pihak lain yang akan berpartisipasi mengenai usulan program dan perencanaan pelaksanaan kegiatan. Setelah berkoordinasi dengan pihak terkait, maka selanjutnya pengabdian mendiskusikan terkait materi yang akan disuguhkan kepada peserta sosialisasi. Lalu, dilakukan pembentukan panitia kecil untuk pelaksanaan kegiatan kedepannya. Seperti persiapan mengenai data warga yang akan diberikan bantuan, pemberitahuan kepada warga, menunjuk koordinator lapangan, menentukan jadwal pendistribusian, dan mempersiapkan tempat. Setelah selesai tahap persiapan, pengabdian pun menginjak kepada tahap selanjutnya, yaitu tahap pelaksanaan. Pelaksanaan ini meliputi pembagian bantuan sosial berupa uang tunai, dan berkoordinasi dengan pihak desa mengenai nominal yang akan diserahkan. Metode tambahan yang digunakan adalah metode tanya jawab, metode ini membuat

kegiatan menjadi lebih menarik karena adanya interaksi seperti akan digunakan untuk apa bantuan tersebut, dan bagaimana perasaan mereka setelah mendapatkan bantuan tersebut.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan mengenai pembagian bantuan sosial ini dimulai pada 4 Agustus 2021 pukul 08.00 WIB. Dilaksanakan di Gedung Serbaguna Desa Batukarut Kab. Bandung.



Gambar 1. Persiapan Sarana Dan Prasarana

Dihadiri oleh 45 warga penerima manfaat yang tersebar dari 14 RW di Desa Batukarut. Acara ini juga dihadiri pihak dari Kepala Desa Batukarut, dan beberapa perangkat desa yang memiliki kepentingan dalam acara pembagian bansos ini. Kegiatan ini terlaksana atas kerja sama dari Desa Batukarut, dengan peserta KKN DR UIN SGD Bandung yang berperan sebagai partisipan dan kontributor dari kegiatan ini. Pembukaan dilakukan oleh Kepala Desa Batukarut, dengan menyampaikan berbagai pesan dan amanah kepada masyarakat desa Batukarut. Juga berisi tentang himbauan dan ajakan untuk menaati protokol kesehatan secara ketat dan menerapkan 6M dengan disiplin.



Gambar 2. Pembukaan oleh Kepala Desa Batukarut

Setelah pembukaan dilaksanakan, dilanjutkan dengan obrolan santai antara perangkat desa dengan masyarakat terkait akan digunakan untuk apa bantuan tersebut. Beragam jawaban yang diterima, seperti membeli sembako, membayar kebutuhan sekolah, bahkan hingga menambah modal usaha. Dari jawaban tersebut diperoleh berbagai jawaban yang variatif yang menandakan bahwa pemberian bantuan sosial ini cukup membantu perekonomian mereka ditengah pandemi ini. Setelah sesi diskusi santai tersebut, selanjutnya diadakan acara utama yaitu pembagian bansos tunai kepada para masyarakat.



Gambar 3. Pemberian Bantuan Sosial Berupa Uang Tunai

Diawali dengan pemberian bantuan sosial oleh Kepala Desa setempat yang berharap uang tunai ini akan berguna demi membantu perekonomian warganya.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandemi covid-19 ini memberikan efek yang cukup keras bagi sektor perekonomian. Dari berbagai sektor perekonomian yang terdampak oleh covid – 19 ini, banyak yang menggantungkan hidup mereka kepada usaha dan lapangan pekerjaan yang terdampak pandemi ini. Maka, atas terdampaknya kegiatan ekonomi tersebut, otomatis anggota keluarga mereka juga mendapatkan dampak secara tidak langsung dari lesunya pertumbuhan ekonomi ini. Analogikan saja dari satu pabrik memiliki karyawan sebanyak 1000 orang, jika ditambah dengan tanggungan dan anggota keluarga masing – masing, maka angka yang dihasilkan cukup besar. Itu hanya satu pabrik, bagaimana jika seluruh Indonesia, ataupun sektor non formal lainnya? Tentunya akan sangat banyak masyarakat yang terdampak pandemi ini. Sehingga pemerintah memberikan solusi berupa stimulus ekonomi pada masyarakat, salah satunya adalah pemberian bantuan sosial ini. Kegiatan pembagian bantuan sosial kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan dihadiri oleh Kepala Desa, peserta KKN sebagai partisipan dan satgas setempat. Dalam melakukan pendistribusian bantuan sosial berupa sembako ini kami menggunakan pendekatan partisipatif. Pendekatan partisipatif menekankan kepada pengumpulan data dan proses pelaksanaan yang melibatkan langsung peranan peneliti. Mulai dari tahap survey, hingga tahap pelaksanaan semuanya dapat berjalan dengan lancar. Berbagai masalah

yang ditemui dari hasil wawancara dan diskusi dengan aparat setempat pun dapat teratasi dengan adanya pembagian bantuan sosial ini. Berdasarkan program pemulihan ekonomi nasional pemerintah, bantuan sosial yang diberikan tidak hanya berfokus terhadap pemberian sembako saja. Tapi terdapat juga bantuan sosial berupa uang tunai. meliputi (1) Program Keluarga Harapan (PKH), (2) Bantuan Sosial Tunai, (3) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa), (4) Bantuan Sosial Sembako (BSS) untuk Wilayah Jakarta Bogor Depok Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek), (5) Kartu prakerja, (6) Kartu sembako, dan (7) Subsidi listrik. Kegiatan yang kami lakukan disini adalah pembagian dalam program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Dalam pelaksanaan pembagian, terlaksana dengan lancar, aman, damai, dan menerapkan protokol kesehatan dengan dipantau langsung oleh satgas covid setempat. Juga dalam pelaksanaan persiapan, juga lancar dalam pelaksanaan tahapan demi tahapannya. Didalamnya juga terdapat sesi diskusi antara pihak desa dengan warganya, yang berisi tentang keluh kesah, dan peruntukan uang yang diterima nantinya. Berbagai jawaban diterima dari para penerima. Ada yang membeli sembako, ada yang membeli perlengkapan sekolah seperti kuota dan perlengkapan penunjang lainnya, membayar listrik, membayar cicilan motor, hingga ada yang menambah modal usaha menggunakan bantuan ini. Beberapa hal yang disebutkan diatas adalah permasalahan yang seringkali dialami masyarakat desa Batukarut saat pandemi seperti ini. Mereka kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari – hari. Dengan hadirnya bantuan sosial ini, berdasarkan jawaban warga setempat bahwa mereka cukup terbantu dengan adanya bantuan sosial yang diberikan pemerintah ini melalui Desa Batukarut. Tujuan diberikannya bantuan sosial ini adalah tujuan untuk menyelamatkan dari kemungkinan terjadinya ancaman sosial (Rahmansyah, (2020).) Seluruh kegiatan ini juga terbebas dari segala tindakan baik dari internal desa ataupun eksternal desa terkait pembagiannya, misalnya pungli, data yang tumpang tindih, hingga politisasi, semuanya tidak terjadi dalam kegiatan pendistribusian bantuan sosial ini. Selanjutnya, diharapkan kegiatan ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan mahasiswa. Bagi masyarakat, kegiatan ini diharapkan sebagai salah satu wujud hadirnya negara dalam situasi pandemi covid-19, selain itu juga sebagai kegiatan untuk meringankan beban masyarakat yang ekonominya mendapat pukulan keras pada masa pandemi ini. Kemudian untuk mahasiswa, kegiatan ini dapat menjadi tempat untuk mengamalkan ilmu yang telah didapatkan sebelumnya dan sebagai wujud peran nyata mahasiswa dalam rangka pengabdian diri kepada masyarakat sesuai dengan tri dharma perguruan tinggi.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Pandemi Covid-19 berdampak buruk pada segala lapisan masyarakat. Tidak hanya masyarakat yang tinggal di kota-kota besar, namun masyarakat di pedesaan pun turut merasakan dampaknya. Kondisi ini dialami oleh masyarakat yang ada di desa Batukarut. Selama masa pandemi covid – 19 terdapat masyarakat desa Batukarut

dirumahkan, bahkan di PHK, dan bagi yang membuka usaha, usahanya sepi sehingga berpengaruh kepada pemenuhan kebutuhan sehari – hari. Oleh karena itu, kami sebagai peserta KKN DR bekerja sama dengan pemerintah Desa Batukarut melaksanakan kegiatan pembagian Bantuan Sosial berupa uang tunai kepada 45 orang penerima manfaat. Dengan diadakannya kegiatan ini diharapkan masalah yang dihadapi masyarakat desa Batukarut dalam memenuhi kebutuhan sehari - hari dapat sedikit teratasi, juga diharapkan bantuan ini dapat membantu meringankan beban yang lainnya. Sesi diskusi antara pihak desa dengan warganya, yang berisi tentang keluh kesah, dan peruntukan uang yang diterima nantinya. Berbagai jawaban diterima dari para penerima. Ada yang membeli sembako, ada yang membeli perlengkapan sekolah seperti kuota dan perlengkapan penunjang lainnya, membayar listrik, membayar cicilan motor, hingga ada yang menambah modal usaha menggunakan bantuan ini. Beberapa hal yang disebutkan diatas adalah permasalahan yang seringkali dialami masyarakat desa Batukarut saat pandemi seperti ini. Mereka kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari – hari. Dengan hadirnya bantuan sosial ini, berdasarkan jawaban warga setempat bahwa mereka cukup terbantu dengan adanya bantuan sosial yang diberikan pemerintah ini melalui Desa Batukarut.

2. Saran

Saran yang diberikan kepada para pihak yang berpartisipasi pada kegiatan tersebut, agar tidak menghamburkan bantuan tersebut kepada hal yang tidak terlalu penting. Selanjutnya, mengingat masa pandemi Covid-19 ini belum bisa ditentukan kapan waktu berakhirnya maka diharapkan bahwa kegiatan ini masih bisa terus berlanjut sehingga pihak-pihak lain juga bisa tergugah hatinya untuk ikut mendukung, gotong royong, bahu membahu membantu saudara-saudara sebangsa yang sangat membutuhkan.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan pengabdian ini tidak akan berhasil tanpa kesediaan pihak Desa Batukarut beserta jajarannya atas kesanggupannya membantu acara ini agar terlaksana dengan baik.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Alfitri. ((2012)). Kldeologi welfare state dalam dasar negara Indonesia: analisis putusan mahkamah konstitusi terkait sistem jaminan sosial nasional. *Jurnal Konstitusi* .
- Gitosaputro, S. (2006). Implementasi Participatory Rural Appraisal (Pra) Dalam Pemberdayaan Masyarakat. . *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*.
- Marlinah, L. (2021). Memanfaatkan Insentif Pajak UMKM Dalam Upaya Mendor ong Pemulihan Ekonomi Nasional . *Jurnal IKRA-ITH Ekonomika Vol 4 No 2*.

- Moeliono, I. D. (1996). *Kebijakan dan strategi menerapkan PRA dalam Pengembangan Program*. . Bandung: Driya Media. .
- Rahmansyah, W. Q. ((2020).). *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara . Pemetaan permasalahan penyaluran bantuan sosial untuk penanganan covid-19 di indonesia*.
- Sitanggang, B. T. ((2014)). . Implementasi kebijakan penyaluran hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan di kabupaten kubu raya . *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN*.
- Sosial, K. ((2017)). *Pedoman umum pelaksanaan sistem layanan dan rujukan terpadu untuk perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan*. Jakarta: Kementerian Sosial.
- Susilo, A. (2020). *Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini*. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia Vol. 7 No.1 Maret 2020*.